



Dampak Narasi Cinta Tanah Air Berbasis Narsisme Kolektif terhadap Sikap Kritis Masyarakat

The Impact of Collective Narcissism-Based Patriotism Narratives on Public Critical Thinking

Rosavira Donel¹, Tatiya Azzahra², Derish Widary Abqori³, Eka Azizah Nuridha⁴,
Fardhan Billizary Arsyada⁵, Fazry Dwi Ardiyansyah⁶

Universitas Gadjah Mada

Email : rosaviradonel@mail.ugm.ac.id¹, tatiyaazzahra@mail.ugm.ac.id², derishwidaryabqori@mail.ugm.ac.id³,
ekaazizahnuridha@mail.ugm.ac.id⁴, fardhanbillizaryarsyada@mail.ugm.ac.id⁵,
fazrydwiardiyansyah@mail.ugm.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 02-06-2026

Revised : 04-06-2026

Accepted : 06-06-2026

Published : 08-06-2026

Abstract

Patriotism is commonly regarded as a positive value that strengthens national unity and social cohesion. However, in contemporary political contexts, patriotic narratives may be transformed into instruments of collective narcissism, in which national pride is exaggerated and used to secure political legitimacy while discouraging public criticism. This study examines the impact of collective narcissism-based patriotic narratives on public critical attitudes in Indonesia during 2025. The research employs a qualitative approach using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) framework. Primary data consist of official speeches delivered by President Prabowo Subianto during the 2025 Annual Session of the People's Consultative Assembly and the 80th United Nations General Assembly, while supporting data were obtained from policy reports, documentation of the "Indonesia Gelap" movement, and records of public protests. The findings reveal that the narrative of "Love for the Homeland" was strategically constructed through rhetorical appeals of ethos, pathos, and logos to redefine loyalty as a moral obligation and to associate criticism with disloyalty. At the discursive level, the narrative was amplified through digital political communication and information control practices, while at the social level it intersected with militarization, political stigmatization, and the marginalization of dissent. These processes contributed to heightened sensitivity toward criticism, declining critical reasoning, increasing social polarization, and the emergence of informal "moral policing" among citizens. The study concludes that collective narcissism-based patriotic narratives function not only as symbols of national unity but also as political instruments that can weaken democratic deliberation, suppress critical citizenship, and reinforce elite power.

Keywords: *collective narcissism, political rhetoric, patriotism.*

Abstrak

Patriotisme umumnya dipandang sebagai nilai positif yang memperkuat persatuan nasional dan kohesi sosial. Namun, dalam konteks politik kontemporer, narasi patriotisme dapat bertransformasi menjadi instrumen narsisme kolektif, yaitu ketika kebanggaan nasional dibesar-besarkan dan digunakan untuk memperoleh legitimasi politik sekaligus menghambat kritik publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak narasi cinta tanah air berbasis narsisme kolektif terhadap sikap kritis masyarakat di Indonesia pada tahun 2025.



Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Data primer berupa pidato resmi Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Umum PBB ke-80 tahun 2025, sedangkan data pendukung diperoleh dari laporan kebijakan, dokumentasi gerakan “Indonesia Gelap,” serta catatan berbagai aksi protes publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi “Cinta Tanah Air” dikonstruksi secara strategis melalui penggunaan retorika *ethos*, *pathos*, dan *logos* untuk mendefinisikan ulang loyalitas sebagai kewajiban moral serta mengasosiasikan kritik dengan ketidaksetiaan terhadap negara. Pada tingkat diskursus, narasi tersebut diperkuat melalui komunikasi politik digital dan praktik pengendalian informasi, sementara pada tingkat sosial beririsan dengan proses militerisasi, stigmatisasi politik, dan marginalisasi suara-suara kritis. Proses tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya hipersensitivitas terhadap kritik, menurunnya kapasitas berpikir kritis masyarakat, menguatnya polarisasi sosial, serta munculnya fenomena “polisi moral” di kalangan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narasi cinta tanah air berbasis narsisme kolektif tidak hanya berfungsi sebagai simbol persatuan nasional, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berpotensi melemahkan deliberasi demokratis, membatasi kewargaan kritis, dan memperkuat kekuasaan elite.

Kata Kunci: narsisme kolektif, retorika politik, patriotisme.

PENDAHULUAN

Nasionalisme sejatinya merupakan fondasi esensial dalam membangun integrasi sosial suatu bangsa. Namun dalam dinamika politik kontemporer, kebanggaan nasional kerap kali dimanipulasi menjadi narsisme kolektif, yakni kondisi di mana identitas kelompok dibangun secara berlebihan namun sesungguhnya berdiri di atas pondasi yang rapuh secara psikologis. Dalam konteks ini, penguasa memanfaatkan instrumen narasi “Cinta Tanah Air” bukan sekadar untuk memupuk pengabdian warga negara, melainkan sebagai alat strategis untuk mengamankan legitimasi politik mereka.

Kajian bibliometrik terkini yang dilakukan oleh Dinić et al. (2025) mencatat bahwa riset mengenai narsisme mengalami lonjakan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, menandakan betapa relevannya konsep ini untuk memahami berbagai fenomena sosial dan politik masa kini. Pada tataran kepemimpinan individual, Bernerth (2022), menemukan bahwa pemimpin dengan kecenderungan narsistik tidak hanya berdampak buruk pada kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan iklim yang destruktif bagi lingkungan sekitarnya. Pola ini relevan untuk memahami bagaimana orientasi narsistik pada pemimpin politik dapat menjalar dan membentuk relasi kekuasaan yang lebih luas di tingkat masyarakat. Lebih jauh, Yuanus et al. (2025) mendokumentasikan bahwa dampak narsisme pemimpin bersifat berlapis, mulai dari level individu, tim, hingga organisasi secara keseluruhan, sebuah pola yang secara struktural berlaku pula dalam kepemimpinan politik.

Pada tataran kolektif, Cichočka & Cislak (2020) secara tegas membedakan antara nasionalisme yang sehat dengan narsisme kolektif. Nasionalisme yang sehat lahir dari identifikasi positif terhadap kelompok, sementara narsisme kolektif didefinisikan sebagai keyakinan berlebihan bahwa kelompok sendiri luar biasa namun tidak mendapat pengakuan yang semestinya dari pihak luar. Kondisi ini justru berakar dari perasaan tidak aman yang disembunyikan di balik sikap agresif dan defensif. Kelompok yang terjebak dalam narsisme kolektif cenderung memandang dunia luar sebagai ancaman permanen, sehingga setiap kritik terhadap kelompok tersebut otomatis dimaknai sebagai serangan eksistensial.



Mekanisme psikologis inilah yang kemudian menjadi tanah subur bagi manipulasi politik. Golec de Zavala & Keenan (2021) mengembangkan kerangka teoritis yang menghubungkan narsisme kolektif dengan bangkitnya populisme, dengan berargumen bahwa retorika populis yang mengangkat narasi "rakyat yang luar biasa namun dizalimi oleh elite" pada dasarnya adalah operasionalisasi narsisme kolektif dalam ranah politik. Narasi semacam ini memberikan rasa superioritas semu kepada khalayak sekaligus memotivasi mereka untuk mendukung pemimpin yang mengklaim diri sebagai pembela martabat bangsa. Sejalan dengan itu, Federico et al. (2023) menegaskan bahwa narsisme kolektif merupakan landasan psikologis yang menopang nasionalisme eksklusif, berbeda dari patriotisme konstruktif yang justru mendorong kritik dan perbaikan dari dalam.

Dampak lebih lanjut dari internalisasi narasi narsistik ini tampak pada merosotnya kapasitas kritis masyarakat. Ketika glorifikasi kejayaan semu dan posisi "dizalimi oleh pihak luar" terus-menerus disebarkan, masyarakat menerimanya sebagai alat untuk menambal harga diri kolektif mereka. Akibatnya, patriotisme yang sehat mengalami pergeseran makna menjadi nasionalisme defensif yang hipersensitif. Kondisi tersebut turut menyuburkan polarisasi sosial yang semakin dalam. Levin et al. (2021) memodelkan bahwa polarisasi politik memiliki dinamika non-linear yang sulit dibalikkan sekali ia mencapai titik kritis tertentu, karena kecenderungan afektif untuk membenci kelompok lawan terbukti lebih kuat mendorong perpecahan ketimbang sekadar perbedaan kebijakan substantif. Dalam konteks Indonesia, Afrimadona (2021) menunjukkan bahwa polarisasi elektoral di Jakarta tidak semata-mata bersumber dari perbedaan preferensi kebijakan, melainkan dari konstruksi identitas kolektif yang saling berseberangan, yang menjadikan batas antara pendukung dan penentang bersifat kaku serta sarat muatan afektif. Hal ini berarti ketika narsisme kolektif berhasil meredefinisikan batas "kawan dan lawan" dalam wacana publik, polarisasi bukan lagi soal perdebatan ide, melainkan soal perang identitas. Golec de Zavala (2024) bahkan menyebut fenomena ini secara eksplisit sebagai ancaman nyata terhadap demokrasi, karena individu dengan narsisme kolektif tinggi cenderung mendukung figur otoritarian yang menjanjikan kejayaan kelompok sambil secara bersamaan melemahkan institusi-institusi demokratis yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Di level mikro-sosial, Fikri Haykal & Nur Alfian (2024) menemukan korelasi antara kepribadian dark triad yang mencakup narsisme dengan pola partisipasi politik pada kalangan remaja akhir di Indonesia, menunjukkan bahwa kecenderungan narsistik bukan hanya gejala elit, melainkan sudah meresap ke dalam cara generasi muda terlibat dalam kehidupan politik.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kelompok penguasa mengonstruksi narasi "Cinta Tanah Air" melalui retorika politik sebagai manifestasi narsisme kolektif demi membangun legitimasi?; 2) Bagaimana proses narasi narsistik tersebut mendefinisikan ulang batas loyalitas publik dan secara organik membungkam sikap kritis di tengah masyarakat?; serta 3) Apa dampak dari internalisasi narsisme kolektif melalui narasi "Cinta Tanah Air" terhadap perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam bentuk hipersensitivitas terhadap kritik dan polarisasi antarwarga? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara kelompok penguasa mengonstruksi narasi tersebut melalui retorika politik, mengurai proses dan mekanisme narasi narsistik dalam mendefinisikan ulang batas-batas loyalitas publik, serta mengidentifikasi dampak sosiopsikologis narsisme kolektif terhadap perilaku



masyarakat, khususnya pada munculnya fenomena hipersensitivitas, agresivitas netizen, dan polarisasi sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) model Norman Fairclough untuk membongkar bagaimana narasi "Cinta Tanah Air" yang berlandaskan narsisme kolektif digunakan sebagai instrumen kontrol politik untuk melemahkan sikap kritis masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik triangulasi sumber, yang terdiri dari data primer berupa naskah resmi dan rekaman video pidato Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025, khususnya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Umum PBB ke-80. Data pendukung diperoleh dari laporan *Policy Assessment* TII mengenai patronase fiskal, dokumentasi gerakan sosial "Indonesia Gelap" terkait penolakan RUU TNI, serta catatan kronologis unjuk rasa besar-besaran Agustus–September 2025 dari berbagai sumber media dan literatur.

Analisis dilakukan melalui tiga dimensi integral Fairclough: pertama, analisis teks (mikro) membedah penggunaan strategi retorika *ethos*, *pathos*, dan *logos* yang mengonstruksi frasa seperti "Cinta Merah Putih" sebagai standar moral untuk mendisiplinkan loyalitas publik dan pejabat. Kedua, praktik diskursus (meso) menelaah proses produksi narasi dalam ruang *mediatized politics* serta upaya pembungkaman kritik melalui represi digital, termasuk penangguhan fitur siaran langsung di media sosial selama aksi protes berlangsung.

Terakhir, praktik sosial (makro) mengkontekstualisasikan wacana tersebut dengan realitas sosio politik Indonesia tahun 2025 yang diwarnai oleh penguatan militerisme dalam ranah sipil dan stigmatisasi sistematis terhadap kritik melalui pelabelan "makar" atau "terorisme" demi mempertahankan stabilitas kekuasaan elit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Tekstual (Mikro): Konstruksi Disiplin melalui Simbol Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa narasi "Cinta Tanah Air" dalam pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 sering kali diartikulasikan melalui frasa "Cinta Merah Putih" untuk menegaskan disiplin birokrasi dan loyalitas publik. Menurut Trisnaningtyas & Anshori (2026), penggunaan strategi retorika *ethos* yang otoritatif, seperti "Saya mantan jenderal, saya tahu apa itu perjuangan", digunakan untuk memberikan legitimasi moral bagi kebijakan pemerintah dan merekonstruksi citra militer menjadi negarawan beretika. Secara tekstual, loyalitas kepada negara direduksi menjadi standar moral perilaku di mana kritik dapat dikesankan sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap bangsa. Paridah et al, (2026) memperkuat temuan ini melalui analisis Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025, di mana strategi *ethos* diwujudkan melalui pemberian penghormatan formal kepada tokoh-tokoh bangsa guna membangun kredibilitas, integritas, dan legitimasi kepemimpinan sejak awal masa jabatan. Selain itu, Hendri & Faizah (2025) mencatat bahwa strategi *pathos* digunakan dengan mengangkat isu kemanusiaan global, seperti tragedi Gaza, untuk membangkitkan empati sekaligus mengonsolidasikan simpati publik guna mengalihkan perhatian dari isu domestik yang



sensitif. Dalam konteks internasional ini, Anwar & 'Aini (2025) mencatat penggunaan moral appeal yang mendalam, di mana Prabowo menggunakan historical analogy yang menyamakan perjuangan kolonialisme Indonesia dengan kondisi Palestina saat ini untuk membangun resonansi emosional dan memperkuat posisi moral Indonesia di kancah global

2. Analisis Praktik Diskursus (Meso): Produksi Narasi dan Kontrol Informasi

Narasi "Cinta Tanah Air" diproduksi secara sistematis melalui saluran komunikasi politik digital atau *mediatized politics*, di mana makna politik dikonstruksi dan disebarluaskan melalui media massa dan pidato publik untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Menurut Trisnaningtyas & Anshori (2026), di era digital ini, retorika politik menjadi krusial dalam mengarahkan opini publik secara luas dan membangun kedekatan emosional. Produksi narasi ini diperkuat dengan distribusi pesan melalui media massa internasional dan domestik guna menjangkau audiens global yang lebih luas, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Berdasarkan analisis Budiman et al. (2025), ruang digital seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi "medan pertempuran utama" dalam produksi dan reproduksi wacana. Di satu sisi, pemerintah memanfaatkan saluran resmi untuk membangun citra positif, namun di sisi lain muncul strategi *affective mobilization* dari kelompok sipil melalui penyebaran poster digital, *meme*, dan video pendek untuk memobilisasi opini publik dan menciptakan ruang diskursif baru guna menandingi narasi resmi negara. Selain itu, Anwar & 'Aini (2025) menambahkan bahwa pemilihan forum internasional seperti PBB berfungsi sebagai strategi diplomasi *high-context*, di mana simbol, nada bicara, dan pilihan kata dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat *nation branding* Indonesia di mata komunitas internasional.

3. Analisis Praktik Sosial (Makro): Hegemoni dan Pembungkaman Kritis

Pada dimensi makro, narasi nasionalisme ini bersinggungan dengan konteks penguatan militerisme dalam ranah sipil melalui RUU TNI 2025. Budiman et al. (2025) menjelaskan bahwa gerakan "Indonesia Gelap" muncul sebagai bentuk resistensi sipil terhadap potensi perluasan peran militer ke sektor non-perang (OMSP) yang dinilai mengancam demokrasi. Dalam praktik sosialnya, pemerintah memberikan label "makar" dan "terorisme" terhadap para demonstran yang kritis terhadap kebijakan negara. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang memaksa masyarakat menjadi pasif karena adanya ketakutan akan stigmatisasi terhadap loyalitas mereka kepada negara. Strategi retorika ini, menurut Anwar & 'Aini (2025), berfungsi sebagai instrumen soft power untuk membangun legitimasi kekuasaan dan mengimbangi dinamika politik domestik dengan citra kepemimpinan yang humanis di mata dunia. Lebih jauh lagi, Paridah et al. (2026) mencatat bahwa pemodelan pidato semacam ini kini diintegrasikan sebagai teknik pembelajaran berbicara bagi siswa di lembaga pendidikan, yang secara sosiologis berperan dalam menanamkan dan menormalisasi gaya kepemimpinan otoritatif tersebut ke dalam kesadaran kolektif generasi muda

Pembahasan

1. Narsisme Kolektif sebagai Alat Kontrol Politik

Pemerintah memulai perubahan paradigma tentang loyalitas dengan memproduksi narasi yang menempatkan kebijakan para elite sebagai wujud patriotisme yang mutlak. Konstruksi ini dibangun secara sistematis melalui strategi retorika politik sang pemimpin. Berdasarkan analisis



terhadap pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80, narasi politik dibangun menggunakan pilar retorika *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Pidato tersebut dengan baik menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin dalam solidaritas global, terutama dalam isu Palestina serta ketahanan pangan. Retorika tersebut berhasil menumbuhkan rasa narsisme kolektif di kalangan masyarakat, sehingga tercipta rasa kebanggaan dan keunggulan nasional.

Narasi "Cinta Merah Putih" beroperasi pada level narsisme kolektif, di mana kepentingan elit dibungkus sebagai kepentingan nasional yang mutlak. Namun narasi kolektif ini memiliki sisi gelap. Ketika pemerintah menerbitkan Inpres 1/2025 mengenai efisiensi anggaran yang mengurangi dana pendidikan dan riset guna meningkatkan anggaran pertahanan dengan narasi "Efisiensi Demi Kepentingan Bangsa". Menurut Primaresti (2025), kebijakan efisiensi anggaran era Prabowo seringkali digunakan sebagai selubung untuk konsolidasi kekuasaan melalui "patronase fiskal," di mana sektor strategis seperti pendidikan dipangkas sementara anggaran lembaga keamanan ditingkatkan. Dengan menggunakan retorika "identifikasi diri dengan rakyat", menampilkan presiden sebagai "presidennya buruh dan petani", pemerintah membangun citra populis yang menuntut pengabdian total dari masyarakat.

2. Marginalisasi Sikap Kritis Masyarakat

Narasi pemerintah dibalut dengan sentimen nasionalisme yang kuat, makna "Loyalitas" mengalami perubahan. Patriotisme kritis yakni mencintai negara dengan mengkritik kebijakan yang tidak tepat. Namun, hal ini berubah menjadi patriotisme buka yang meminta dukungan tanpa syarat untuk pemimpin.

Ketika narasi ini diterima oleh masyarakat, siapa saja yang menolak kebijakan pemerintah akan dianggap memiliki niat buruk dan akan dianggap sebagai anti nasionalis. Hal ini terlihat jelas dalam protes Agustus-September 2025, dimana pemerintah dan kalangan elite politik dengan cepat membuat narasi bahwa peserta aksi adalah alat dari campur tangan asing dan penyebaran konflik. Konstruksi ancaman dari luar ini memanipulasi perasaan cinta tanah air untuk membenarkan tindakan represif, seakan kritik masyarakat adalah upaya untuk meruntuhkan negara.

Stigmatisasi terhadap sikap kritis memanifestasikan dirinya dalam tindakan nyata di lapangan. Kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan dan mahasiswa Rheza Sendy Pratama dalam kerusuhan menjadi titik puncak di mana emosi publik dilemahkan dengan janji-janji kompensasi materiil, seperti pemberian rumah, alih-alih reformasi struktural institusi keamanan. Penggunaan bahasa yang mengutamakan "perdamaian sosial" digunakan untuk menekan kemarahan publik dan menormalisasi tindakan aparat yang berlebihan.

3. Dampak terhadap Demokrasi

Fase paling penting dari dominasi wacana ini adalah saat penekanan tidak lagi memerlukan campur tangan langsung dari pemerintah, tetapi terjadi secara langsung di antara masyarakat satu sama lain. Ketika banyak pendukung pemerintah sudah menerima pandangan tentang kebanggaan bersama dan melihat pemimpin mereka sebagai simbol keberhasilan negara, mereka akan merasa tersinggung secara pribadi jika terdapat orang yang mengkritik pemerintah.

Fenomena ini sangat terlihat dalam pembicaraan tentang RUU TNI tahun 2025, ketika pemerintah mengatakan bahwa memperkuat militer dilakukan untuk "Perlindungan Bangsa",



warga memberikan tanggapan dengan gerakan “Indonesia Gelap” sebagai bentuk penolakan terhadap peningkatan peran militer. Alih-alih menciptakan ruang diskusi yang sehat, kampanye penolakan ini malah memicu perdebatan di antara masyarakat. Para pendukung pemerintah bertindak sebagai “Polisi Moral” di media sosial dan tempat-tempat umum, dengan cara yang alami menyerang gerakan tersebut. Mereka menyebut para aktivis sebagai orang yang mengkhianati, anti militer, dan tidak mencintai negara.

Narasi "Cinta Tanah Air" berbasis narsisme kolektif ini telah menciptakan budaya ketakutan yang menghambat pertumbuhan demokrasi. Penangkapan aktivis seperti Paul dari *Social Movement Institute* dan pelabelan provokator terhadap pegiat literasi menunjukkan penyempitan ruang diskusi publik. Alih-alih membangun literasi kritis, retorika pemerintah justru memaksa masyarakat menjadi pasif melalui tekanan normatif religius, seperti kutipan dalam pidato Prabowo: "Allah tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya," yang digunakan untuk membungkam tuntutan keadilan bagi korban kekerasan aparat.

Dalam keadaan ini, arti loyalitas telah benar-benar menjadi bagian dari lembaga. Simpatisan menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan dan membungkam warga negara yang lain. Secara keseluruhan, narasi nasionalisme pada era ini bukan lagi sekadar simbol pemersatu, melainkan instrumen komunikasi politik strategis untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan elit di tengah krisis legitimasi domestik.

4. Polarisasi dan Matinya Nalar Kritis dalam Ruang Publik

Pergeseran makna loyalitas yang menempatkan dukungan terhadap pemerintah sebagai ukuran patriotisme memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan publik. Ketika kritik dikonstruksikan sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa, masyarakat cenderung menghindari penyampaian pendapat yang berbeda karena khawatir mendapat stigma sosial sebagai kelompok anti-nasionalis. Hal ini membuat proses evaluasi rasional terhadap kebijakan negara mengalami kemunduran.

Fenomena tersebut terlihat dalam polemik revisi RUU TNI tahun 2025. Narasi pemerintah yang menempatkan penguatan militer sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional menyebabkan sebagian masyarakat lebih berfokus pada simbol patriotisme dibandingkan substansi kebijakan yang diperdebatkan. Kritik terhadap perluasan peran militer dalam ranah sipil seringkali dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap kepentingan bangsa. Sehingga, ruang diskusi publik tidak lagi berorientasi pada pertukaran argumen yang berbasis data tetapi pada penilaian terhadap identitas politik pihak yang menyampaikan kritik.

Situasi ini sejalan dengan konsep *echo chamber* yang dijelaskan oleh Cinelli et al. (2021), yaitu situasi ketika individu terus-menerus terpapar informasi yang memperkuat keyakinan kelompoknya sendiri sehingga mengurangi keterbukaan terhadap perspektif alternatif. Kondisi tersebut menyebabkan sudut pandang masyarakat semakin homogen dan sulit mendapatkan fakta valid yang bertentangan dengan identitas politiknya. Matinya nalar kritis ini menjadi salah satu dampak utama dari internalisasi narasi nasionalisme berbasis narsisme kolektif.



5. Hegemoni Kultural dan Fenomena “Polisi Moral”

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pembungkaman kritik tidak selalu dilakukan melalui instrumen negara. Tekanan justru muncul dari masyarakat yang telah menginternalisasi narasi kekuasaan sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Bentuk kontrol sosial dilakukan secara horizontal oleh warga negara terhadap sesama warga negara.

Fenomena tersebut tampak dalam respons publik terhadap gerakan "Indonesia Gelap" yang menolak revisi RUU TNI. Alih-alih memfokuskan perhatian pada substansi tuntutan demonstran, sebagian pengguna media sosial secara aktif melakukan pelabelan negatif terhadap peserta aksi dengan sebutan seperti "Mahasewa", anarkis, dan merusak. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan hegemoni wacana. Dominasi berlangsung melalui persetujuan sosial yang membuat masyarakat secara sukarela menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang diinginkan oleh kelompok dominan. Dengan demikian, pendukung pemerintah berperan sebagai "polisi moral" yang mengawasi batas-batas loyalitas politik dan menentukan siapa yang dianggap patriotik atau ancaman bagi bangsa.

6. Partisipasi Politik Negatif dan Agresivitas di Ruang Digital

Dalam demokrasi yang sehat, partisipasi politik bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan dan mendorong penyelesaian masalah publik. Namun, di situasi polarisasi yang tinggi, aktivitas politik sering kali bergeser menjadi upaya mempertahankan identitas diri dan menyerang kelompok lawan.

Kondisi tersebut terlihat dalam berbagai perdebatan digital sepanjang gelombang demonstrasi Agustus-September 2025. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang deliberasi publik justru berubah menjadi tempat konflik identitas. Perbedaan pendapat mengenai kebijakan pemerintah seringkali berujung pada serangan personal, perundungan daring (*cyberbullying*), penyebaran informasi yang menyesatkan (*hoax*), hingga kampanye delegitimasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik. Juditha, (2025) pun membahas mengenai fenomena “Indonesia Gelap” yang menunjukkan adanya peningkatan tajam polarisasi opini publik di media sosial selama gelombang protes mahasiswa tahun 2025. Penelitiannya tersebut menemukan bahwa percakapan digital didominasi oleh sentimen yang terbelah secara ekstrem antara kelompok pendukung dan kelompok penentang pemerintah.

Agresivitas publik juga diperkuat oleh mekanisme *affective polarization*, yaitu kecenderungan individu untuk mengembangkan rasa permusuhan emosional terhadap kelompok politik lain. Dalam kondisi ini, perbedaan politik dipandang ancaman terhadap kelompok sendiri yang mengakibatkan respons yang muncul berupa kemarahan, penghinaan, dan upaya membungkam pihak yang berbeda pendapat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa polarisasi yang dibangun melalui narasi nasionalisme berbasis narsisme kolektif telah mendorong masyarakat untuk lebih mudah terlibat dalam konflik simbolik dibandingkan diskusi demokratis yang konstruktif.

KESIMPULAN

Kelompok penguasa mengonstruksi narasi "Cinta Tanah Air" dan "Cinta Merah Putih" dengan fondasi retorika *ethos* yang otoritatif, serta *pathos* yang mengeksploitasi isu kemanusiaan global. Dengan memproduksi narasi tersebut di bawah kedok sentimen emosional publik, penguasa



telah memicu narsisme kolektif di kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah berhasil mengemas beberapa kebijakan yang menguntungkan sepihak, seperti pemotongan anggaran riset melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan rancangan undang-undang (RUU) TNI 2025.

Narasi narsisme kolektif tersebut mengakibatkan pergeseran makna dari patriotisme kritis menjadi patriotisme buta yang menuntut dukungan tanpa syarat kepada penguasa. Melalui pemanfaatan saluran digital, seperti penggunaan *influencer* berbayar dan pembatasan komunikasi digital di kala unjuk rasa, sikap kritis masyarakat dibungkam dengan stigmatisasi seperti cacat moral dan anti-nasionalisme. Selain itu, internalisasi narsisme kolektif ini membawa dampak destruktif terhadap perilaku sosial masyarakat, terutama memicu munculnya hipersensitivitas terhadap kritik dan *affective polarization*.

Sebagian kelompok pendukung pemerintah cenderung tersinggung secara personal di saat kebijakan baru pemimpin mereka dikritik. Akibatnya, marak terjadi *cyberbullying* yang menasar masyarakat kritis. Pada akhirnya, eksploitasi sentimen nasionalisme demi melanggengkan kekuasaan elite telah memicu kemunduran demokrasi yang sangat serius di Indonesia. Ruang digital yang seharusnya menjadi area diskusi publik yang sehat kini bertransformasi menjadi medan tempur digital akibat benturan identitas yang agresif. Di saat kritik dicap sebagai bentuk ketidaksetiaan, nalar kritis publik mengalami kematian. Kondisi ini memaksa masyarakat menjadi pasif demi menghindari stigmatisasi sosial. Sementara di sisi lain, kendali para elite menjadi fondasi yang kokoh dan sulit diruntuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 315–339. <https://doi.org/10.1177/18681034211007490>
- Anwar, M. D. M., & 'Aini, F. N. (2025). Analisis Retorika Politik dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 Tahun 2025. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 415–428.
- Bernerth, J. B. (2022). Does the Narcissist (and Those Around Him/Her) Pay a Price for Being Narcissistic? An Empirical Study of Leaders' Narcissism and Well-Being. *Journal of Business Ethics*, 177(3), 533–546. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04595-1>
- Budiman, G. M., Pramana, G. I., & Erviantono, T. (2025). Analisis gerakan sosial Indonesia Gelap dalam kampanye tolak RUU TNI tahun 2025. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(11), 31–40.
- Cichocka, A., & Cislak, A. (2020). Nationalism as collective narcissism. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 34, 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2019.12.013>
- Cinelli, M., de Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(9). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Federico, C. M., Golec De Zavala, A., & Bu, W. (2023). Collective Narcissism as a Basis for Nationalism. *Political Psychology*, 44(1), 177–196. <https://doi.org/10.1111/pops.12833>
- Fikri Haykal, M., & Nur Alfian, I. (2024). Hubungan Antara Kepribadian Dark Triad Dengan Partisipasi Politik Remaja Akhir di Indonesia. *Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*.
- Giovannesandesva Hendri, & Hasnah Faizah. (2025). Prabowo Subianto's Leadership in His



- Speech at the 80th UN General Assembly: A Rhetorical Analysis of *Ethos*, *Pathos*, and *Logos*. *International Journal of Social Science and Humanity*, 2(4), 20–28. <https://doi.org/10.62951/ijss.v2i4.512>
- Golec de Zavala, A. (2024). Authoritarians and “revolutionaries in reverse”: Why collective narcissism threatens democracy. *Group Processes and Intergroup Relations*, 27(5), 1027–1049. <https://doi.org/10.1177/13684302241240689>
- Golec de Zavala, A., & Keenan, O. (2021). Collective narcissism as a framework for understanding populism. *Journal of Theoretical Social Psychology*, 5(2), 54–64. <https://doi.org/10.1002/jts5.69>
- Juditha, C. (2025). The Phenomenon of “Indonesia Gelap” on Social Media: Sentiment Analysis and Public Opinion Polarization. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 157–170. <https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.33846>
- Levin, S. A., Milner, H. V., & Perrings, C. (2021). The dynamics of political polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(50). <https://doi.org/10.1073/pnas.2116950118>
- M. Dinić, B., Jevremov, T., & Wertag, A. (2025). Perspective Chapter: Trends in Research of Narcissism – A Bibliometric Analysis. *Psychology of Narcissism - Theory, Research Trends, Interpersonal Relations and Digital Impact*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011491>
- Paridah, S., Kulsum, U., & Arifin, M. Z. (2026). Analisis Retorika Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 (Sebagai Alternatif Teknik Pembelajaran Berbicara pada Siswa). *Journal of Authentic Research*, 5(1), 551–560.
- Primaresti, F. (2025). *Efisiensi Anggaran Era Prabowo : Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite*.
- Trisnaningtyas, F., & Anshori, M. (2026). Membangun Narasi Politik : Studi Retorika Pidato Presiden Prabowo Subianto. *PIKMA: Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 8, 306–324.
- Yuanus, F., Choirunnisa, Z., & Putra, Y. A. N. S. (2025). The Impact of Leader Narcissism On Organizational Performance: A Multilevel Literature Review At The Individual, Team, And Organizational Levels. *Jurnal Governansi*, 11 Nomor 2, 143–152.